

## **Kenaikan Harga Barang Pokok Mempengaruhi Inflasi dan Stabilitas Politik: Studi Ekonomi Politik di Pasar Aur Duri Jambi**

Silvi Oktaviani<sup>a</sup>, Kesih Merdiyanti<sup>b</sup>, Nazwa Salsabilla<sup>c</sup>, Siti Syudaha<sup>d</sup>, Imelia<sup>e</sup>, Sitti Rahma<sup>f</sup> Yuda Apriyanto<sup>g</sup>

Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jambi

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted: June 11, 2025

Reviewed June 12, 2025

Accepted: June 29, 2025

### **ABSTRACT**

*Inflation is an economic phenomenon that significantly influences political stability, particularly in developing countries such as Indonesia. The rising prices of basic necessities, which serve as a primary driver of inflation, not only weaken the public's purchasing power but also trigger social unrest that may threaten the legitimacy of the government. This study aims to analyze the correlation between inflation especially that caused by surging prices of essential goods and political stability in Indonesia. The research focuses on how national political-economic policies respond to inflationary pressures from the perspective of market actors and the accompanying social dynamics. This study employs a descriptive qualitative approach using field interviews and document analysis. Primary data were obtained through direct interviews with basic goods vendors in traditional markets who are directly affected by price increases, while secondary data were gathered from scholarly publications, official government reports, and other relevant documents published between 2018 and 2024. The analysis reveals that inflation contributes to a decline in purchasing power, disruption of micro-enterprises, and heightened social tension, all of which may lead to political instability. Government interventions such as Market Operation Programs and Affordable Food Initiatives are perceived by vendors not only as economic strategies but also as political efforts to ease public anxiety and maintain trust in state leadership. In conclusion, inflation control must become a top priority in national political-economic strategy, serving not only to preserve economic stability but also to ensure political continuity and social welfare at the grassroots level.*

### **KEYWORDS**

*Inflation<sup>1</sup>, Political Stability<sup>2</sup>, Essential Goods<sup>3</sup>, Economic Policy<sup>4</sup>, Indonesia<sup>5</sup>*

---

---

## 1. Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam ekonomi makro yang kerap menjadi fokus perhatian pemerintah, pelaku pasar, dan kalangan akademisi. Secara umum, inflasi berarti meningkatnya harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu (Annizar et al., 2025). Kondisi ini menjadi sorotan penting karena apabila tidak terkendali, inflasi dapat mengganggu kestabilan ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan konsumsi maupun investasi. Namun, inflasi dalam tingkat yang moderat sering dipandang sebagai cerminan ekonomi yang sehat, karena menunjukkan adanya permintaan yang tinggi dalam aktivitas perekonomian.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, inflasi sering kali disebabkan oleh naik turunnya harga barang kebutuhan pokok yang sangat peka terhadap perubahan dalam distribusi, produksi, serta kondisi iklim. (Gea Andira, 2020) juga menyatakan bahwa “perubahan harga komoditas pangan dapat menjadi penyumbang terbesar laju inflasi,” yang umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan bahan pokok.

Bahkan di daerah seperti Pasar Aur Duri, Kota Jambi, inflasi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan seperti cabai, bawang, beras, dan daging yang terjadi akibat terganggunya distribusi dan produksi. Meskipun demikian, tekanan inflasi ini bukan hanya persoalan teknis ekonomi semata, tetapi juga berdampak langsung pada aspek politik. Stabilitas politik menjadi sangat rentan ketika masyarakat menghadapi kenaikan tajam harga kebutuhan pokok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara inflasi khususnya yang dipicu oleh kenaikan harga barang pokok dengan stabilitas politik di Indonesia. Fokus utama kajian adalah bagaimana kebijakan politik-ekonomi pemerintah merespons tekanan inflasi dalam menjaga stabilitas sosial dan menghindari potensi gejolak politik. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika inflasi dan politik dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara lapangan dan studi dokumen. Penulis mengumpulkan dan menganalisis data melalui wawancara langsung dengan para pedagang bahan pokok di pasar tradisional, serta menelaah berbagai artikel dan dokumen relevan untuk mengkaji hubungan antara inflasi dan stabilitas politik dalam konteks politik ekonomi Indonesia, khususnya terkait kenaikan harga barang pokok. Sumber-sumber yang digunakan mencakup transkrip wawancara lapangan, artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi.

Pemilihan informan difokuskan pada pedagang bahan pokok yang secara langsung terdampak oleh fluktuasi harga, sementara pemilihan artikel didasarkan pada kesesuaian topik, kemutakhiran (diterbitkan

---

dalam rentang waktu 2018–2024), dan kredibilitas sumber yang telah melalui proses tinjauan sejawat (peer review). Data yang diperoleh mencakup pengalaman dan persepsi pedagang mengenai dampak kenaikan harga terhadap daya beli konsumen, kelangsungan usaha mereka, serta potensi keresahan sosial yang muncul di lingkungan pasar.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama dari narasi para pedagang, membandingkannya dengan temuan studi terdahulu, dan menarik kesimpulan konseptual mengenai pengaruh inflasi terhadap dinamika stabilitas politik di Indonesia. Metode ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam melalui suara langsung pelaku ekonomi rakyat serta didukung oleh kajian teori dan data sekunder yang relevan.

### **3. Pembahasan**

Perekonomian Indonesia, sebagaimana negara berkembang lainnya, tidak luput dari tantangan inflasi yang merupakan bagian integral dari dinamika ekonomi makro. Inflasi yang didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, memainkan peranan penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi nasional. Ketika inflasi tidak terkendali, nilai mata uang mengalami depresiasi, daya beli masyarakat melemah, dan kestabilan ekonomi pun terganggu (Nanda & Sari, 2019).

Inflasi juga memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. (Sarbaini & Nazaruddin, 2023) menegaskan bahwa menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil berkontribusi terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Dalam kondisi tersebut, para pelaku usaha cenderung meningkatkan produksinya karena adanya ekspektasi keuntungan yang lebih besar (Feronika Br Simanungkalit, 2020). Peningkatan produksi ini berdampak pada naiknya Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, inflasi yang tidak stabil atau terlalu rendah justru dapat menimbulkan efek sebaliknya. Ketika harga barang tidak naik secara signifikan dan cenderung berfluktuasi, produsen merasa tidak cukup termotivasi untuk meningkatkan produksi (Suriyani & Sudiartha, 2018). Di sisi lain, inflasi yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, karena harga barang kebutuhan pokok menjadi tidak terjangkau. Akibatnya, terjadi pelemahan konsumsi masyarakat, penurunan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan ketidakpuasan terhadap pemerintah (Salim et al., 2021).

Salah satu pemicu utama inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga pangan, yang berdampak signifikan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Di Pasar Aur Duri, Kota Jambi, kenaikan harga pangan sering dipicu oleh gangguan distribusi, ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, serta faktor eksternal seperti iklim dan fluktuasi harga global. Contohnya, pada awal tahun 2024, tomat merah mengalami lonjakan harga paling dramatis, naik dari Rp12.000 menjadi Rp30.000 per kilogram atau sekitar 150% akibat gangguan pasokan akibat banjir di daerah penghasil seperti Kerinci. Selain itu, cabai rawit merah sempat mencapai harga Rp80.000 per kilogram, naik antara 33% hingga 100% dari harga normal, sementara bawang merah naik sekitar 25% dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram pada Oktober 2024. Lonjakan harga yang signifikan ini memperlihatkan bahwa inflasi pangan tidak hanya bersifat temporer, melainkan juga memiliki efek struktural terhadap ketahanan ekonomi dan

---

stabilitas sosial masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok secara terus-menerus dapat meningkatkan angka kemiskinan, menurunkan daya beli, dan memicu keresahan sosial yang jika tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada instabilitas politik, terutama bila masyarakat merasa pemerintah tidak hadir atau gagal merespons kondisi tersebut secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2025, diperoleh temuan dari wawancara dengan pedagang di Pasar Aur Duri 2. Mayoritas pedagang menyampaikan bahwa kenaikan harga tidak selalu memberikan dampak positif terhadap laba usaha mereka. Keuntungan cenderung meningkat apabila pedagang membeli barang dari pemasok dengan harga yang masih rendah, lalu menjualnya saat harga pasar naik. Sebaliknya, jika kenaikan harga terjadi secara merata dari pemasok hingga ke konsumen, justru menyebabkan penurunan margin keuntungan. Para pedagang juga memahami bahwa kelangsungan keuntungan sangat ditentukan oleh jumlah barang yang terjual dan kemampuan beli masyarakat. Dalam beberapa situasi, peningkatan harga dapat mendorong kenaikan keuntungan karena mengikuti pola permintaan tertentu. Namun, dalam kondisi lain, justru dapat menurunkan pendapatan, terutama jika terjadi gangguan pasokan atau penurunan daya beli konsumen (Mai Apriyani et al., 2024).

Pedagang cenderung menyesuaikan jumlah stok berdasarkan waktu dan momen tertentu. Biasanya, stok akan ditambah pada awal bulan atau menjelang hari-hari besar, seperti akhir pekan dan hari libur nasional, saat peluang terjadinya peningkatan pembelian lebih tinggi. Sebaliknya, saat mendekati akhir bulan, jumlah stok dijaga tetap agar tidak berlebihan. Untuk komoditas seperti cabai, jumlah yang dibeli pedagang sangat bergantung pada kualitas serta harga dari pihak pemasok. Penyesuaian ini mencerminkan bahwa pedagang memiliki naluri bisnis yang peka terhadap pola konsumsi konsumen.

Untuk mengatasi kenaikan harga, pedagang menerapkan berbagai strategi penyesuaian. Langkah-langkah tersebut meliputi pengurangan volume pembelian, pemilihan pemasok secara lebih selektif, serta penyesuaian harga jual kepada konsumen. Selain itu, pedagang memanfaatkan waktu-waktu tertentu, seperti ketika harga dari pemasok masih rendah, untuk membeli dalam jumlah besar dan menjual kembali saat harga meningkat. Para pedagang mengungkapkan bahwa setiap kali terjadi kenaikan harga, pembeli sering kali bereaksi dengan terkejut. Dalam satu hingga dua hari pertama setelah harga berubah, konsumen biasanya mengurangi jumlah barang yang dibeli. Akan tetapi, setelah periode penyesuaian singkat ini, kebiasaan belanja mereka umumnya kembali seperti semula.

Fenomena ini mencerminkan adanya elastisitas permintaan dalam jangka pendek, di mana reaksi konsumen terhadap perubahan harga bersifat sementara. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Anggita Mujayanah et al., 2024), yang menyatakan bahwa meskipun daya beli masyarakat sempat menurun akibat lonjakan harga, konsumen pada akhirnya menyesuaikan perilaku konsumsinya sesuai kondisi baru. Para pedagang melaporkan bahwa saat harga mengalami kenaikan, frekuensi tawar-menawar dari pelanggan menjadi lebih tinggi. Namun, jika harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, sering kali mereka memilih untuk membatalkan pembelian. Kondisi ini menggambarkan bahwa konsumen pasar tradisional memiliki tingkat kepekaan harga yang cukup besar. (Sari et al., 2023) menjelaskan bahwa harga adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen, khususnya di pasar yang mayoritas pelanggannya berasal dari segmen ekonomi menengah ke bawah seperti pasar tradisional.

---

Sebagai respons, pemerintah daerah menjalankan berbagai program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM). Program-program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga menjelang hari raya, sekaligus memastikan kelompok masyarakat rentan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. OPM misalnya, dilakukan dengan cara menyediakan barang kebutuhan pokok di bawah harga pasar melalui kerja sama dengan pedagang, BUMN, atau langsung kepada konsumen, guna menambah pasokan dan menekan harga (Zahra et al., 2023)

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan adanya integrasi antara politik ekonomi dan stabilitas sosial, di mana intervensi pemerintah dalam mengelola inflasi pangan tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi menjadi krusial, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan kestabilan politik tetap terjaga dalam menghadapi tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Inflasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki konsekuensi besar terhadap stabilitas sosial dan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, lonjakan harga barang pokok yang dipicu oleh inflasi telah menguji ketahanan politik ekonomi nasional. Beberapa dampak utama inflasi yang berkaitan erat dengan stabilitas politik antara lain:

#### 1. Penurunan Daya Beli Ketidakpuasan Publik

Menurut (Lamatenggo et al., 2019), inflasi yang menyebabkan harga barang dan jasa terus meningkat akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, kelompok berpenghasilan rendah akan merasakan tekanan yang lebih besar, karena mereka harus mengalokasikan proporsi penghasilan yang lebih besar untuk kebutuhan pokok. Penurunan daya beli ini dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, terutama bila dianggap gagal dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Ketika masyarakat tidak mampu mengakses kebutuhan dasar secara layak, hal ini bisa menjadi pemicu keresahan sosial dan mengganggu legitimasi politik pemerintah.

#### 2. Meningkatnya Pengangguran dan Ketidakstabilan Sosial

Inflasi yang tinggi cenderung menyebabkan penurunan investasi dan produktivitas. Perusahaan menghadapi kenaikan biaya produksi, dan dalam kondisi daya beli yang melemah, mereka mungkin terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja. (Pangesti & Susanto, 2018) menekankan bahwa meningkatnya pengangguran akibat inflasi berdampak langsung terhadap kestabilan sosial. Tingginya tingkat pengangguran dapat meningkatkan tekanan terhadap pemerintah dan memperbesar kemungkinan munculnya protes atau ketegangan politik, terutama bila disertai persepsi bahwa pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi ekonomi yang memburuk. Di sinilah pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja, guna menjaga stabilitas politik yang berkelanjutan.

#### 3. Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakpercayaan Terhadap Kebijakan

Inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. (Erik Bisri Alamsyah, 2021) menyatakan bahwa ketidakstabilan harga membuat perencanaan bisnis menjadi sulit, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Dalam konteks politik, melemahnya ekonomi dan menurunnya investasi

---

dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola perekonomian. Ketika rakyat meragukan efektivitas kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi inflasi dan menjaga harga barang pokok tetap terjangkau, hal ini bisa berdampak pada stabilitas politik nasional.

#### 4. Meningkatkannya Ketimpangan Sosial dan Politik Identitas

Inflasi memberikan dampak yang tidak merata kepada kelompok masyarakat. Mereka yang memiliki pendapatan tetap, seperti pensiunan dan pekerja informal, lebih terdampak dibandingkan kelompok kaya atau berpenghasilan tinggi. (Soeharjoto, 2021) menunjukkan bahwa inflasi berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ini bukan hanya memicu kecemburuan sosial, tetapi juga dapat memperkuat polarisasi politik. Dalam situasi seperti ini, isu-isu ekonomi kerap digunakan sebagai alat mobilisasi politik oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggoyang kekuasaan. Ketimpangan yang semakin nyata di tengah masyarakat bisa memperuncing konflik politik berbasis identitas dan memperburuk polarisasi dalam demokrasi.

#### 5. Strategi Politik Ekonomi dalam Menangani Inflasi

Untuk menghadapi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas politik, diperlukan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kebijakan sosial yang menysasar kelompok rentan, termasuk melalui subsidi pangan, perlindungan sosial, dan pelatihan tenaga kerja. Selain itu, bank sentral perlu menjaga keseimbangan antara pengetatan moneter dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. (Jayanthi dan Arka, 2019) menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas harga tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan dalam menjaga harga barang pokok tetap terjangkau bisa berdampak pada keresahan politik, terutama menjelang momen politik elektoral atau di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

### **4. Kesimpulan**

Inflasi, terutama yang dipicu oleh lonjakan harga barang kebutuhan pokok, memberikan pengaruh besar tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga terhadap kestabilan politik di Indonesia. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat melemahkan daya beli masyarakat, menambah angka pengangguran, mengurangi minat penanaman modal, memperbesar kesenjangan sosial, serta menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi legitimasi politik dan ketenteraman sosial nasional, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh tekanan inflasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan keterpaduan antara kebijakan ekonomi-politik yang selaras antara pemerintah dan lembaga moneter. Upaya seperti pelaksanaan pasar murah dan pemberian subsidi bahan pokok menjadi langkah strategis guna menjaga kestabilan harga serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, kerja sama antara kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi tanpa menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan penerapan kebijakan yang komprehensif dan tanggap, pemerintah dapat mempertahankan kestabilan ekonomi sekaligus mencegah timbulnya gejolak politik akibat keresahan

## Daftar Pustaka

- Anggita Mujayanah, Desty Angraini, Pinkan Dwi Ananda, & Rasidah Novita Sari. (2024). Dampak Inflasi terhadap Kesenjangan Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 339–346. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1444>
- Annizar, S. L., Saputry, M. A., Nurmawati, P., Firmawati, R., Hidayati, A. N., Sayyid, U., & Tulungagung, A. R. (2025). *INFLASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN : MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM*. <https://journalpedia.com/1/index.php/ime>
- Erik Bisri Alamsyah. (2021). PENGARUH INFLASI TERHADAP KESTABILAN DAN EKSISTENSI USAHA EKONOMI MIKRO. *YOS SOEDARSO ECONOMICS JOURNAL (YEJ)*, VOL 3(1).
- Feronika Br Simanungkalit, E. (2020). *PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA* (Vol. 13, Issue 3).
- Gea Andira. (2020). PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK TERHADAP TINGKAT INFLASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, Vol. 1(2).
- Jayanthi dan Arka. (2019). ANALISIS PENGARUH INVESTASI, EKSPOR, INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI. *JURNAL HARIAN REGIONAL*, 8(9).
- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., Layuck, I. A. C., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). *PENGARUH INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA MANADO*.
- Mai Apriyani, F., Mubaraq, A., Artikel, R., Kunci, K., & Fluktuasi harga Kelangkaan dan kebijakan Pemerintah, S. (2024). *ANALISIS PENYEBAB DAMPAK KENAIKAN HARGA SEMBAKO TERHADAP KELANGKAAN BAHAN POKOK DI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR PAGI KECAMATAN PONTIANAK KOTA)* Universitas Tanjungpura 123 *INFO ARTIKEL*. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>
- Nanda, C., & Sari, P. (2019). *Analisis Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa Tahun*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK>
- Pangesti, I., & Susanto, R. (2018). PENGARUH INFLASI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA. In *Journal of Applied Business and Economics* (Vol. 5, Issue 1).
- Salim, A., Uin, P., & Palembang, R. F. (2021). *Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),
- Sarbaini, & Nazaruddin. (2023). Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Laju Inflasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 2(1), 25–32.
- Sari, D., Dekas, R., & Haqiqi, T. M. (2023). Dampak Produk, Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Pasar Tradisional. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1032–1039. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6899>
- Soeharjoto, O. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 5(2).
- Suriyani, N. K., & Sudiarta, G. M. (2018). *PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA*. 7(6), 3172–3200. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i06.p12>

---

Zahra, S., Taufiq Abadi, M., Rosyada, M., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2023). *ANALISIS KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MENJELANG BULAN RAMADHAN DI PASAR INDUK KAJEN* (Vol. 2, Issue 1).